

**PERAN PENGADILAN NEGERI MELALUI PENETAPANNYA DALAM
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM
KEADAAN STATUS QUO**

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
72/Pdt.P/2009/PN. BB)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

NAMA : CRHRISTIAN HARYADI

NIM : 217181001



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANEGARA**

JAKARTA, JULI 2020

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : Christian Haryadi
NIM: 217181001
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis:

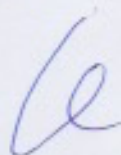
**Peran Pengadilan Negeri Melalui Penetapannya Dalam Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum
Dalam Keadaan Status Quo**

**(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
72/Pdt.P/2009/PN.BB)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Tesis Program Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan Lulus
dalam Sidang Ujian Tesis Tanggal 21 Juli 2020, dengan Majelis Penguji terdiri
atas:

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. |
| 2. Anggota | : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum. |

Jakarta, 22 Juli 2020
Pembimbing,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI

Nama Peserta : Christian Haryadi
N.I.M : 217181001
Program Studi : Magister Kenotariatan

JUDUL TESIS :

**PERAN PENGADILAN NEGERI MELALUI PENETAPANNYA DALAM
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM KEADAAN STATUS QUO
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR
72/PDT.P/2009/PN.BB)**

Jakarta, 22 Juli 2020
Pembimbing Tesis,



Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat yang telah memberikan rencana dan kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “ Peran Pengadilan Negeri Melalui Penetapannya Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum Dalam Keadaan Status Quo ” yang merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Puji dan syukur, tesis ini disusun dengan bantuan, doa dan dukungan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Orangtua penulis, ayahanda tercinta Dr. Pieter Everhardus Latumeten, SH., MH., SpN., Ibunda tercinta almarhum Soetarti, SH., Mkn., binti Poeswadi yang selalu memberikan motivasi dalam hidup dari sejak lahir hingga saat ini, Istri tercinta Gabriella surentu yang selalu sabar menemani penulis dalam menyelesaikan studinya, dan anak-anak penulis Alethea Evangelista Dianti latumeten, Mateo Shalom Latumeten, Jethro Natanyahu Latumeten yang menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, perhatian kasih sayang dan doa yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah penulis, kesemuanya itu sangat berarti bagi penulis serta kepada seluruh keluarga besar penulis yaitu untuk adik-adik tersayang Malvin Nugroho, SH., MKn., Dea Pratiwi, SH., MH., Mkn., selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang penulis hormati, Bapak Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., MM., Mkn., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Yang penulis hormati, Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, SH., SS., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
3. Yang penulis hormati, Bapak / Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran berharga selama perkuliahan.

4. Yang penulis hormati, segenap karyawan dan staff tata usaha magister kenotariatan Fakultas Hukum Tarumanegara yang telah memberikan informasi perkuliahan dan membantu keperluan administrasi dalam rangka penyusunan tesis ini.
5. Sahabat-sahabat yang begitu berarti bagi penulis yaitu teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2018 yang tidak bias disebutkan satu persatu dengan semangat belajarnya yang tinggi memberikan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bentuk penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Terima kasih.

Depok, 3 agustus 2020

Penulis

Christian Haryadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II PENYELENGGARAN RUPS PT BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI.....30

A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	30
B. Tugas dan Kewenangan Organ Perseroan Terbatas.....	39
C. Syarat dan Ketentuan RUPS Perseroan Terbatas.....	50
D. Tugas Dan Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan RUPS Perseroan Terbatas.....	62

BAB III HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN PIHAK KETIGA...72

A. Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas	72
B. Hak Perseorangan (<i>Personal Right</i>).....	84
C. Hak Derivatif.....	87
D. Permohonan Menurut Hukum Acara Perdata	98

**BAB 4 DATA HASIL PENELITIAN DAN ANALISAN HUKUM TERHADAP
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR
72/PDT.P/2009/PN.BB107**

A. Posisi Kasus108

B. Pertimbangan Hukum Hakim.....111

C. Analisa Hukum Berkaitan Dengan RUPS Perseroan Terbatas114

 1. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelenggaraan RUPS PT ...115

 2. Implikasi Hukum Kepemilikan Saham Berimbang Dalam PT X.....122

 3. Pengaturan Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas126

 4. Perseroan Terbatas Dengan Klasifikasi Saham133

BAB V PENUTUP

A. Simpulan140

B. Saran145

DAFTAR PUSTAKA.....149

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Christian Haryadi

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Peran Pengadilan Negeri Melalui Penetapannya Dalam Penyelenggaraan RUPS PT Sebagai Subjek Hukum Dalam Keadaan Status Quo (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 72/Pdt.P/2009/PN.BB)

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas atau jika Direksi berhalangan tetap, diwakili oleh Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas dalam keadaan status quo jika Direksi dan Dewan komisaris telah berakhir masa jabatannya, dan adanya kepemilikan saham yang seimbang dalam Perseroan Terbatas yaitu masing masing memiliki 50 % (limapuluh) persen saham, dan jika tidak ada musyawarah mufakat maka Rapat Umum Pemegang Saham dalam mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris baru tidak dapat mengambil keputusan yang sah. Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, untuk menjawab bagaimana peran Pengadilan Negeri dalam memberikan izin kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara, dan menetapkan syarat syarat Rapat Umum pemegang Saham agar Rapat Umum pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan bagaimana rumusan dalam anggaran dasar Perseroan terbatas dalam mengatasi kepemilikan saham yang berimbang ini. Dalam menjawab masalah tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap kepemilikan saham yang berimbang dimana Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, Hasil penelitian bahwa Pengadilan Negeri dapat menetapkan syarat pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Umum pemegang saham dan anggaran dasar dapat dibuat dengan klasifikasi saham seri A sebagai saham biasa dan saham dengan seri B sebagai saham tanpa hak suara.

Kata Kunci: Pengadilan, RUPS PT, Status Quo